

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya tujuan utama dari didirikannya sebuah perusahaan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya guna mengembangkan kegiatan perusahaan menjadi lebih baik. Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya perusahaan memerlukan modal yang besar sehingga mengakibatkan perusahaan cenderung hanya berfokus dan mementingkan kepentingan manajemen serta para pemilik modal (investor dan kreditor). Namun, dalam dunia bisnis paradigma yang sebelumnya hanya berfokus pada pencarian laba kini telah bertransformasi menjadi pembangunan berkelanjutan. Perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, dan masyarakat di sekitar perusahaan karena perusahaan mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional (Tobing, 2019).

Konsep *Triple Bottom Line* yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 memberikan dasar bagi perusahaan untuk menyusun laporan yang berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan dalam perannya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini dinamai sebagai Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Pada zaman sekarang *sustainability report* telah menjadi isu utama bagi perusahaan yang mengakibatkan perusahaan kini tidak hanya mementingkan aspek ekonomi saja tetapi juga memperhatikan lingkungan serta masyarakat sekitar.

Sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang diciptakan oleh John Elkington yang menekankan tiga pilar utama keberlanjutan seperti *Profit* (Keuntungan), *People* (Manusia), dan *Planet* (Bumi), Panneels, (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *Triple Bottom Line* (TBL) kini menjadi *Quintuple Bottom Line* (QBL) yang menambahkan dua elemen tambahan, yaitu *Purpose* (Tujuan) dan *Place* (Tempat), untuk memberikan dimensi yang lebih luas dalam pendekatan keberlanjutan.

Sustainability Reporting Guideline menyatakan bahwa *Sustainability Reporting* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta memperlihatkan adanya upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal maupun eksternal untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang dimana saat ini perusahaan diminta untuk melampirkan laporan berkelanjutan (*Sustainability reporting*). Selain itu, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), khususnya Pasal 74 ayat 1, yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terdapat sebuah pedoman yang digunakan oleh perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report* berdasar kepada *Global Reporting Initiative (GRI) Standards Guidelines*. *Global Reporting Initiative (GRI)* merupakan sebuah standar dalam praktik global untuk menganalisis berbagai dampak dari sebuah perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Berdasarkan pada standar GRI, *sustainability report* dikembangkan untuk memberikan informasi mengenai kontribusi positif atau negatif perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan atau semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya (Tobing, 2019). Sejak berkembangnya isu mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan menjadi sorotan utama terhadap perannya terhadap lingkungan. Meskipun pelaporan *sustainability report* dianggap penting, masih terdapat banyak perusahaan yang belum menerbitkan *sustainability report*. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan yang mewajibkan penerbitan *sustainability report* sehingga masih

bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi hal ini tidak mengurangi minat dari perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*, hal yang mendorong minat perusahaan ini disebabkan oleh munculnya isu yang selalu diperdebatkan di kalangan masyarakat seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif dari aktivitas perusahaan yang mengakibatkan adanya tuntutan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Beberapa kasus terjadi terutama pada perusahaan yang beroperasi menggunakan sumber daya alam yang rentan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah satunya adalah perusahaan di sektor energi yang merupakan salah satu sektor industri utama dalam tatanan ekonomi global. Secara geologis, Indonesia memiliki sumber daya alam pertambangan yang begitu menjanjikan sehingga hal ini digunakan untuk memperoleh hasil tambang seperti batuan, minyak dan gas, batu bara, serta mineral dan logam (Irfan et al., 2023). Namun, hal inilah yang justru akan menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan sebagai akibat dari kegiatan perusahaan seperti pencemaran air dan udara dari asap dan debu yang ditimbulkan serta munculnya zat beracun dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan.

Terdapat isu-isu yang beredar mengenai permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan tanggung jawab suatu perusahaan kepada lingkungan sekitar misalnya saja PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional terbesar, Pertamina mendapat sorotan atas kebijakan keberlanjutan dan pelaporannya. Isu kebocoran minyak di perairan Karawang pada tahun 2019 yang mencemari kawasan lautan sekitar dan berdampak pada kesehatan nelayan dan masyarakat pesisir sekitar yang secara langsung membantu membersihkan limbah-limbah minyak maupun yang bertempat tinggal tidak jauh dari kawasan pencemaran tersebut (Kiara, 2019). Hal ini mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan dalam sistem manajemen lingkungan Pertamina. Kejadian ini mendorong publik untuk mempertanyakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu keterbukaan informasi dalam *sustainability report* dianggap menjadi sangat

penting untuk menunjukkan respon perusahaan dalam memperbaiki tata kelola lingkungannya.

Beberapa kasus lain yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan pada sektor energi sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan diantaranya adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang dituding membuang limbah tailing dari tambang Grasberg ke sungai di Papua pada tahun 2020. Kemudian PT. Medco Energi yang pada tahun 2020 diduga melakukan pencemaran air sungai dari aktivitas pembuangan limbah produksi gas bumi, sehingga limbah tersebut mengalir ke anak sungai Teupin Raya (UY & Hendrawati, 2020). PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang mencemari sungai dan pesisir pantai, hingga merusak ekosistem mangrove di Halmahera Timur (JATAM, 2021). Tumpahan minyak PT. Energi Mega Persada (ENRG) yang dilaporkan telah mencemari perairan Siak, Riau (Riau Akses, 2023). Kerusakan lingkungan di sekitar Bukit Pulai, Nagari IV Koto Hillie, Sumatra Barat yang disebabkan oleh tumpahan BBM dari tangki truk pengangkut milik PT. Elnusa Petrofin (ELSA) (KlikPositif, 2022).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan, terutama dalam sektor energi yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Sektor energi merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan. Pengungkapan informasi keberlanjutan oleh perusahaan energi dapat memberikan transparansi mengenai upaya mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Berdasarkan dalam laporan *Global Competitiveness Index (GCI) 2023* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, menyebutkan bahwa negara Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 140 negara mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal keberlanjutan. Hal ini masih tergolong rendah dan diperlukan upaya yang lebih dalam pengungkapan keberlanjutan sebagai sarana bagi perusahaan di sektor energi untuk menunjukkan tanggung jawab mereka dalam mengelola dampak yang dihasilkan dari operasinya. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan sektor energi untuk diteliti.

Pedoman *sustainability report* GRI menyediakan prinsip-prinsip *sustainability report*, pengungkapan standar, dan arahan dalam penyusunan *sustainability report*. Berdasarkan GRI *Standard* atau GRI versi terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2018, terdapat 148 item yang harus diungkapkan dalam pembuatan laporan keberlanjutan serta pengungkapan laporan keberlanjutan terbagi dalam 4 seri kategori utama yakni : Seri 100 mencakup tiga standar universal, Seri 200 Kinerja Ekonomi, Seri 300 Lingkungan, dan Seri 400 Sosial. Sesuai dengan SEOJK. 04/2020 yang membahas tentang bentuk dan isi laporan tahunan untuk emiten atau perusahaan publik, terdapat pedoman teknis mengenai *sustainability report* yang dijelaskan secara rinci pada bagian III, laporan keberlanjutan harus menyatakan paling sedikit mencakup 63 item atau 43% dari yang harus diungkapkan dan terdiri dari 7 kategori utama, yakni : 1 item Strategi Keberlanjutan, 10 item Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan, 9 item Profil Perusahaan, 3 item Penjelasan Direksi, 5 item Tata Kelola Keberlanjutan, 30 item Kinerja Keberlanjutan, dan 5 item Lain-lain.

Sustainability report dalam penelitian ini disusun berdasarkan pedoman dari GRI yaitu *Sustainability Report Disclosure Index (SRDi)*. SRDi merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menilai bagaimana tanggung jawab perusahaan sesuai dengan kriteria menurut GRI, yaitu *Economic, Environmental, and Social (Labor Practices and Decent work, Human Rights, Society and Product Responsibility)*. Adapun cara menghitung indeks SRDi yaitu skor item yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah item menurut GRI *Standard* yaitu 148 item, dimana terdapat beberapa kriteria dalam penilaian tersebut. Apabila perusahaan mengungkapkan item yang terdapat di *GRI Standards* maka diberi nilai 1 dan apabila tidak mengungkapkan maka diberi nilai 0 (Rahmah et al., 2024). Berikut merupakan data pada perusahaan sektor energi mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan yang terjadi pada tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1
Indeks SRDi Pada Perusahaan Sektor Energi Beserta Jumlah Item Yang
Diungkapkan

NO	KODE	INDEKS SRDI (%)					RATA-RATA	KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	ABMM	58	68	93	95	95	82	M
2	ADRO	66	65	54	58	65	62	M
3	ADMR	0	0	32	39	39	37	TM
4	AIMS	0	0	0	0	0	0	TM
5	AKRA	40	42	68	68	64	56	M
6	APEX	0	0	25	18	18	20	TM
7	ARII	0	0	0	0	0	0	TM
8	ARTI	14	16	18	16	16	16	TM
9	ALII	0	0	0	0	49	49	M
10	ATLA	0	0	0	0	9	9	TM
11	BBRM	25	26	24	35	35	29	TM
12	BESS	32	34	35	35	35	34	TM
13	BIPI	35	27	27	27	27	29	TM
14	BSSR	25	28	31	21	21	25	TM
15	BULL	20	20	22	22	22	21	TM
16	BUMI	58	56	66	54	54	58	M
17	BYAN	14	20	8	21	21	17	TM
18	BOSS	0	0	0	0	0	0	TM
19	BSML	0	0	0	24	0	24	TM
20	CANI	0	0	0	0	0	0	TM
21	CNKO	10	8	20	15	15	14	TM
22	COAL	0	0	0	20	20	20	TM
23	CBRE	0	0	0	10	9	10	TM
24	CGAS	0	0	0	0	62	62	M

25	CUAN	0	0	0	0	0	0	TM
26	DEWA	54	56	54	51	51	53	M
27	DOID	45	27	39	21	21	31	TM
28	DWGL	0	0	8	8	8	8	TM
29	DSSA	14	39	25	14	14	21	TM
30	ELSA	43	45	39	20	20	33	TM
31	ENRG	35	43	45	22	22	33	TM
32	FIRE	18	21	25	25	25	23	TM
33	GEMS	15	16	31	74	74	42	TM
34	GTBO	6	5	7	8	8	7	TM
35	GTSI	0	0	44	0	0	44	M
36	HITS	0	0	0	0	0	0	TM
37	HRUM	34	16	14	18	18	20	TM
38	HUMI	0	0	0	0	33	33	TM
39	HILL	0	0	0	51	43	47	M
40	IATA	11	8	14	24	24	16	TM
41	INDY	35	37	76	76	76	60	M
42	ITMA	65	65	65	65	65	65	M
43	ITMG	36	59	59	59	59	54	M
44	INPS	0	0	0	34	34	34	TM
45	JSKY	0	0	0	0	0	0	TM
46	KKGI	29	20	20	20	20	22	TM
47	KOPI	0	0	0	0	0	0	TM
48	LEAD	36	59	59	59	59	54	M
49	MAHA	0	0	0	0	23	23	TM
50	MBAP	12	12	18	17	18	15	TM
51	MBSS	29	27	33	33	33	31	TM
52	MCOL	14	14	14	20	20	16	TM

53	MEDC	33	33	33	35	35	34	M
54	MTFN	8	8	13	13	13	11	TM
55	MYOH	19	22	22	21	21	21	TM
56	MKAP	0	0	0	0	9	9	TM
57	PGAS	70	70	81	81	81	77	M
58	PKPK	19	22	22	22	22	21	TM
59	PSSI	15	18	18	18	18	17	TM
60	PTBA	54	72	74	74	74	70	M
61	PTRO	39	68	53	68	68	59	M
62	PTIS	0	0	0	0	0	0	TM
63	RAJA	24	25	28	28	28	27	TM
64	RIGS	24	25	28	28	28	27	TM
65	RMKE	0	0	34	42	43	40	TM
66	RUIS	14	16	16	25	25	19	TM
67	RMKO	0	0	0	0	11	11	TM
68	RGAS	0	0	0	0	11	11	TM
69	SMMT	33	33	33	33	30	32	TM
70	SHIP	18	21	25	30	30	25	TM
71	SMRU	15	15	15	15	15	15	TM
72	SOCI	19	24	30	30	30	27	TM
73	SUGI	0	0	0	0	0	0	TM
74	SGER	14	14	20	25	25	20	TM
75	SURE	11	16	20	22	22	18	TM
76	SEMA	0	0	0	24	24	24	TM
77	SICO	0	0	14	23	23	20	TM
78	SUNI	0	0	0	9	36	23	TM
79	TAMU	15	18	12	15	15	15	TM
80	TCPI	27	37	37	37	37	3	TM

81	TEBE	21	25	25	35	35	28	TM
82	TOBA	32	35	33	39	39	36	TM
83	TPMA	14	14	30	30	30	24	TM
84	TRAM	0	0	0	0	0	0	TM
85	UNIQ	12	12	16	16	16	14	TM
86	WINS	31	33	33	35	35	33	TM
87	WOWS	0	0	0	0	0	0	TM

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa hanya 17 dari 87 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan *sustainability report*, ini artinya sekitar 80,46% perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan yang dianjurkan. Hasil perhitungan *sustainability reporting* ini memiliki skor nilai yang tergolong rendah dengan banyaknya perusahaan-peusahaan sektor energi yang tidak melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dengan jumlah item penuh atau ideal sesuai dengan yang telah ditentukan SEOJK. 04/2020 pada nilai item *sustainability reporting*, yaitu paling sedikit harus mencakup 43% dari yang harus diungkapkan. Hal ini terjadi karena kebanyakan perusahaan menghadapi dilema dalam melaporkan isu yang dapat menurunkan citra atau reputasi mereka, sehingga memilih untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu dalam *sustainability report* (Dayan, 2020).

Nilai atas pengungkapan *sustainability reporting* pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2023 masih banyak yang berada di bawah standar GRI dan masih belum memenuhi standar GRI yang seharusnya, ini menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan masih belum menyadari betapa pentingnya melakukan pengungkapan *sustainability reporting*. Jumlah perusahaan yang

mengungkapkan *sustainability report* ini masih rendah disebabkan karena pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) (Widyaningsih, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widowati & Mutmainah, (2023) mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yaitu ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat leverage, tingkat pertumbuhan perusahaan, proporsi komisaris independen, dan tingkat kepemilikan manajerial. Clara & Salim, (2022) menyatakan bahwa umur perusahaan, narsisme CEO dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap laporan keberlanjutan. Sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa faktor diantaranya yaitu dewan direksi, kepemilikan manajerial, komite audit dan *Slack resources*.

Faktor pertama yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan *sustainability reporting* adalah Dewan Direksi, yang merupakan komponen utama pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Organ pusat dalam sebuah perusahaan, yang memegang sebuah tanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan disebut dengan dewan direksi (Ardiani et al., 2022). Hanan & Setiawan, (2023) menunjukkan bahwa dewan direksi mempengaruhi *sustainability report* dilihat dari jumlah anggota dewan yang ada dalam perusahaan, maka diindikasikan perusahaan dengan dewan yang besar cenderung lebih peka terhadap kepatuhan dan regulasi termasuk dalam pengungkapan informasi keberlanjutan.

Pada penelitian terdahulu Latifah, (2019) menyatakan bahwa banyaknya rapat yang dilakukan dewan akan hubungan antar dewan direksi menjadi semakin meningkat dan mampu untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Nugraha, (2024) juga menyatakan bahwa dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap *sustainability report*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sofa & Respati, (2020) dan A. P. Dewi et al., (2024) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap *pengungkapan sustainability report*.

Faktor kedua yang dianalisis adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan manajerial merujuk pada kondisi dimana manajer perusahaan juga memiliki saham perusahaan dan secara aktif terlibat proses pengambilan keputusan (Tyasa & Taqwa, 2023). Kepemilikan Manajerial perusahaan dapat diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Madona & Khafid, 2020). Kepemilikan manajerial dapat mendorong para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, semakin termotivasi pula para manajer untuk berupaya lebih keras dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.

Pada penelitiannya Tyasa & Taqwa, (2023) menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*. Anisa et al., (2023) Tidak sejalan dengan hasil penelitian Madona & Khafid, (2020) serta Nuraeni & Darsono, (2020) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Faktor ketiga adalah keberadaan komite audit yang seharusnya memungkinkan perusahaan agar lebih efektif mengelola akuntabilitas informasi, termasuk pengungkapan informasi dalam bentuk laporan keberlanjutan. Komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat (Graha et al., 2023). Komite audit juga bertanggung jawab dalam pengawasan terkait kualitas keterbukaan perusahaan baik informasi pada aspek keuangan maupun keberlanjutan (Sofa & Respati, 2020). Komite audit akan berfungsi lebih optimal seiring dengan peningkatan frekuensi pertemuan yang dilakukan. Hal ini akan memungkinkan manajemen untuk melakukan pengendalian yang lebih baik, sekaligus meningkatkan transparansi informasi perusahaan kepada publik. Dengan demikian, upaya ini akan mendukung tercapainya tata kelola perusahaan yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani et al., (2022), Graha et al., (2023) dan Oktapiani & Simatupang, (2024) menunjukkan bahwa pengungkapan

sustainability report dipengaruhi secara positif oleh komite audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian Ikhsan & Wijayanti, (2021) dan Setiawan & Ridaryanto, (2022) yang menunjukkan bahwa komite audit justru berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*

Kemudian faktor keempat yang diindikasikan berpengaruh terhadap *sustainability report* adalah *Slack resources*. Dalam penelitiannya Bourgeois, (1981) menyatakan bahwa *Slack resources* adalah kelebihan sumber daya yang digunakan perusahaan untuk menghadapi kondisi tidak terduga baik dari internal maupun external. Perusahaan dengan *Slack resources* yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas lebih untuk mengungkapkan informasi secara menyeluruh, karena mereka memiliki sumber daya tambahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Adanya sumber daya berlebih ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan serta meningkatkan kedalaman laporan yang disampaikan.

Napitu & Siregar, (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Slack resources* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan., selain itu Sari et al., (2022) dalam penelitiannya menyatakan membuktikan bahwa *Slack resources* berpengaruh terhadap pengungkapan kualitas tanggung jawab social. Namun berdasarkan penelitian Hanan & Setiawan, (2023) menunjukkan bahwa *Slack resources* berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan identifikasi faktor-faktor yang diduga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DEWAN DIREKSI, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT DAN SLACK RESOURCES TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?
4. Apakah *Slack resources* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memperoleh fakta secara empiris untuk menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*
2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*
3. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*
4. Pengaruh *Slack resources* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Pengaruh Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan *Slack resources* Terhadap Pengungkapan *Sustainability*” dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan yang terbagi dalam dua sudut pandang, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengembangan teori terhadap ilmu akuntansi, terutama berkaitan dengan pengaruh Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan *Slack resources* terhadap Pengungkapan

Sustainability Report pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi perusahaan terutama sektor energi dalam melakukan kebijakan mengenai pengungkapan *sustainability report* yang disajikan serta membantu perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* serta menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca.